

MEMUDARNYA KEPEMIMPINAN POLITIK ULAMA

Oleh:
Arif Rohman
Staf Pengajar FIP UNY

Abstract

The involvement of ulama in the election organized by New Order since 1971 to 1997 almost constantly showed positive result, especially in increasing the number of contestant vote. However, what happened in 1999 election was on the contrary. The objective of study is thus: first, to describe the process of the political leadership of ulama in political parties; second, to investigate the characteristics of the political leadership of ulama; third, to find out the causal factors of the fading submissiveness of people to the political leadership of ulama. Using behaviorism approach the data collected consist of verbal data, document data and occurrences record. The data is collected through: (1) in-depth interview of 35 subjects sampled out purposively; (2) observation; and (3) the study of the written data of local KIPP and PPD; with the triangulation of method variation, situation variation, and data source variation. The place of the study of Sewon and Pleret subdistricts represents Bantul regency of Special District of Yogyakarta. The data is analyzed qualitatively using "flow" model. Finally, the result of the study are (1) the majority of ulama has conducted their leadership as the chairmen and board members of politic parties in democratic way. (2) The characteristic of their leadership is considered to be 'active-negative'. (3) The causal factors of the fading submissiveness of people to the political leadership of ulama are: the economic burden of the people as a result of the crisis, mass media information, the increasingly high education level of the people, the growing rationalistic consideration of the people.

Keywords: Leadership of Ulama, Political Party, Election, and The Fading Submissiveness.

PENDAHULUAN

Hampir semua pemilu yang diselenggarakan Orde Baru sejak tahun 1971 sampai dengan 1997 secara empirik menunjukkan

adanya indikasi keterlibatan ulama Islam atau sering dipanggil dengan sebutan *kiai*. Meskipun keterlibatan mereka hanya sebatas sebagai 'corong partai', dalam setiap kampanye ataupun dalam sosialisasi program partai yang diwakilinya diharapkan keterlibatan mereka akan dapat mendulang suara pemilih, terutama di daerah-daerah kantong muslim.

Hasil studi Ridhah Taqwa (1996) di Sulawesi Selatan membuktikan bahwa pada pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992 hampir semua partai peserta pemilu memanfaatkan elit agama (ulama) dalam upaya memenangkan pemilu. Penelitian M. Asfar (1997) dan J. Kristiadi (1996) juga menunjukkan hal yang sama yakni adanya keterlibatan ulama dalam setiap pemilu. Hal ini makin memperkuat bahwa keterlibatan dan pelibatan ulama dalam pemilu merupakan fenomena yang sering terjadi sehingga oleh sebagian masyarakat sudah dianggap biasa.

Rekrutmen ulama oleh partai-partai yang ada pada proses pemilu, khususnya pada saat kampanye dalam kenyataannya telah meningkatkan perolehan suara partai yang bersangkutan secara signifikan, terutama pada awal dan pertengahan Orde Baru (J. Kristiadi, 1996:81). Hal ini terjadi dikarenakan para ulama dalam konteks kekuasaan memiliki "hubungan otoritas tradisional" (*traditional authority relationship*) dengan massa Islam, khususnya di daerah kantong santri. Salah satu ciri menonjol dari daerah

kantong santri adalah banyaknya pondok pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan yang berlabel Islam di dalamnya, seperti: Jombang (Jawa Timur), Demak (Jawa Tengah), Tasikmalaya (Jawa Barat), Bantul (DIY), dan daerah-daerah lain.

Pola hubungan otoritas tradisional ulama dengan santri sebagaimana disebut di atas, ditandai oleh beberapa hal, di antaranya: (a) adanya hubungan antarkeduanya bersifat sangat pribadi (*highly personal*), tidak lugas, kewajiban yang tidak terbatas, dan merupakan persekutuan antara yang punya dengan yang tidak punya; (b) hubungan mereka bersifat vertikal, dan (c) adanya upaya menjaga keseimbangan hubungan yang bersifat *atas-bawah* (MM. Billah, 1978).

Dengan tipe hubungan antarkeduanya yang demikian itu telah menyebabkan partai-partai peserta pemilu menjadi tergiur untuk melibatkan ulama dalam setiap pemilu. Beberapa elit partai mencoba menggaet ulama (terutama *kiai khos*) untuk dilibatkan dalam kepartaian guna mendulang suara dari sejumlah besar massa pengikut. Oleh karena itu, kehadiran mereka dalam partai seolah telah menjadikan semacam garansi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan serta mendongkrak perolehan suara di daerah kantong-kantong muslim.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pada pemilu 1999 keterlibatan ulama tidak saja hanya sebagai corong politik

dan mesin pengumpul suara, tetapi mereka juga sekaligus sebagai pemilik partai tertentu. Pada pemilu era multipartai ini, ulama banyak yang terlibat mendirikan dan menjadi pengurus partai, seperti pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Suni, dan Partai Nahdlatul Ummat (PNU).

Oleh karena keterlibatan politik ulama yang makin dalam tersebut, logikanya mereka akan berupaya seoptimal mungkin dalam memobilisasi massa pengikut untuk mendukung dan mengikuti fatwa politiknya. Mereka akan memanfaatkan ketokohan dirinya untuk kepentingan partainya sendiri agar bisa keluar sebagai pemenang pemilu (*the winner*). Namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, terbukti perolehan suara dari partai-partai yang dipimpin ulama pada pemilu 1999 mengalami keterpurukan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Misalnya di daerah Bantul (salah satu daerah kantong santri di DIY) menunjukkan bahwa, partai-partai yang didukung ulama memperoleh suara jeblok. Perolehan suara masing-masing partai ulama secara berturut-turut adalah: PKB 87.861 (19,39%), PPP 26.119 (5,76%), SUNI 1.680 (0,37%), PKU 1.662 (0,37%), dan PNU 1.580 (0,35%). (*Dokumen KIPP dan PPD II Bantul, 17 Juni 1999*). Sementara itu, PDIP di daerah yang sama yang *nota bene* kurang didukung ulama justru memperoleh suara 146.618 (32,31%).

Berdasarkan paparan di atas, pengaruh kepemimpinan politik ulama dalam menggaet massa pengikut mulai diragukan. Oleh karenanya, yang menjadi masalah adalah: (a) bagaimana proses dan karakter kepemimpinan ulama dalam mengelola partai politik? dan (b) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi luntarnya kepatuhan masyarakat terhadap kepemimpinan politik ulama?

Secara teoretik, kepemimpinan menurut Miftah Toha (1995:117) diartikan sebagai aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang diharapkan; baik yang menyangkut tujuan ekonomi maupun politik. Ada tiga tipe pemimpin politik, bila mengacu kepada teori Max Weber (George Ritzer, 1996), yaitu: (a) tradisional, (b) legal-rasional, dan (c) karismatik. Tipe pemimpin yang disebut terakhir inilah yang oleh AM. Moesa (1999:87) dimiliki oleh ulama atau kiai. Tipe pemimpin karismatik adalah tipe seseorang yang memiliki keistimewaan atau kelebihan sifat/aspek kepribadiannya sehingga mampu menggerakkan orang lain yang disebabkan oleh rasa hormat, segan, dan kepatuhan dari yang dipimpin.

Pada organisasi yang disebut partai politik, kepemimpinan politik dimiliki oleh pengurus, khususnya ketua umum partai politik. Kepemimpinan politik tersebut antara lain ditandai oleh adanya otoritas. Robert Michels (Ramlan Surbakti, 1997)

menyebutkan bahwa struktur hierarki menentukan otoritas sehingga makin tinggi kedudukan struktural seseorang akan makin tinggi pula otoritas yang dimiliki. Begitu pula sebaliknya, makin rendah kedudukan struktural seseorang akan makin kecil otoritas yang dipunyai.

Sebagai sosok yang dianggap memiliki penguasaan dan kedalaman ilmu dalam komunitas muslim/santri, *ulama* sering dihormati dan dijadikan tokoh panutan. Salah satu ciri-ciri terpenting dalam kehidupan komunitas santri adalah ditematkannya ulama (kiai) pada posisi tinggi (M. Asfar, 1997). Dalam struktur sosial yang lebih sempit, pesantren misalnya, kedudukan kiai adalah yang tertinggi. Para santri selalu patuh dan taat tanpa *reserve* kepada kiai sehingga fatwa-fatwa kiai hampir selalu diikuti, sedangkan orang yang menentang fatwa kiai dalam pandangannya akan *kualat* (hidup menderita).

Sebagian komunitas muslim mengakui bahwa ulama memiliki sumber kekuasaan yang disebut "otoritas tradisional" (*traditional authority*). Sumber otoritas tradisional tersebut menurut Z. Dofier (1982) berasal dari tiga hal, yaitu: (a) keluasan dan kedalaman ilmunya, (b) status ekonomi yang dimiliki, dan (c) memiliki keturunan (*nasab*) kiai atau masih ada hubungan keluarga kiai seperti menjadi menantu kiai. Oleh karena kepemimpinan ulama bersumber dari otoritas tradisional, pola kepemimpinan

ulama juga diidentikkan dengan pola kepemimpinan tradisional. Namun demikian, hanya dengan sumber kewenangan tradisional tidaklah cukup. Menurut Wahid (1993), bahwa ulama tidak bisa bertahan hanya dengan sumber kewenangan tradisionalnya semata, tetapi mereka membutuhkan sumber kewenangan lain seperti intelektual atau wawasan makro dalam rangka mengaktualisasikan dirinya dengan persoalan kemanusiaan yang lebih rumit.

Pada bagian lain, kepemimpinan politik bisa diamati dan diukur atas dasar tiga kriteria: (a) proses kepemimpinan dan karakter pemimpin, (b) hasil kepemimpinan, (c) sumber kekuasaan pemimpin (Ramlan Surbakti, 1992). Dilihat dari prosesnya, seorang pemimpin dapat dikategorikan sebagai demokratis dan elitis, sedangkan dilihat dari karakternya, terdapat empat tipe: (a) pasif-positif, (b) aktif-negatif, (c) pasif-negatif, dan (d) aktif-positif.

Karakter pemimpin yang *pasif-positif* adalah mereka yang tidak secara aktif melaksanakan tugas, tetapi sangat menilai tinggi pekerjaannya. Sebaliknya karakter pemimpin yang *aktif-negatif* adalah mereka yang secara aktif melaksanakan tugasnya, tetapi kurang menilai tinggi hasil pekerjaannya. (Surbakti, 1992). Oleh karena itu, pasif dan aktifnya suatu karakter kepemimpinan dilihat dari cara mereka melaksanakan tugas, sedangkan positif dan negatifnya dipandang dari cara mereka menilai pekerjaannya.

Cara Penelitian

Penelitian dengan pendekatan behavioristik ini berusaha menggali data yang berupa data: verbal, dokumen; dan rekaman observasi. Data verbal bersumber pada hasil percakapan, pernyataan, dan rekaman pidato para elit partai, khususnya ulama serta dari beberapa santri. Data dokumen berasal dari catatan tertulis milik partai yang dikelola ulama dan catatan hasil-hasil pemilu 1999 (dalam hal ini adalah dokumen yang dimiliki Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Panitia Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Bantul). Adapun data rekaman observasi berupa hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan politik ulama dalam memimpin partai serta dalam berinteraksi dengan masyarakat santri di daerah Bantul. Maka dari itu berbagai data tersebut digali dan dikumpulkan melalui tiga cara, yakni dengan cara: (a) wawancara mendalam, (b) observasi, dan (c) penelitian dokumen.

Wawancara dilakukan dengan empat tenaga lapangan yang telah dilatih, terhadap 35 subjek penelitian untuk mengungkap pandangan-pandangan, ide-ide, dan alasan-alasan mengenai suatu pilihan serta tindakan politik yang diambil. Hal ini dengan dua alasan: *pertama*, sulitnya mencari sekian banyak subjek, terutama subjek yang statusnya ulama (kiai) pengelola partai sebab tidak semua ulama terlibat dalam partai politik. *Kedua*, dengan sebanyak 35 subjek penelitian yang telah diwawancarai dan diminta

informasinya ternyata telah terjadi *redundansi* dan atau kejenuhan data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, akhirnya diputuskan dan dipandang data yang terkumpul sudah cukup.

Sebanyak 35 subjek tersebut, terdiri dari 5 ulama partai, 10 orang pengurus partai, 10 orang santri pondok pesantren, dan 10 orang masyarakat alumni pesantren atau mereka yang tinggal dekat dengan ulama partai. Kesemuanya ditentukan dan dipilih secara *purposive*. Lima ulama di atas dipilih mewakili tokoh ulama dari PKB, PPP, PKU, PNU, dan Partai SUNI. Sepuluh pengurus partai diambilkan secara proporsional dari kelima partai tadi, sedangkan 10 subjek lainnya merupakan massa pendukung partai, yang dipilih melalui dua tahap. *Tahap pertama*, dipilhkan menurut status keantrian subjek, yakni: antara yang berstatus santri dengan yang sudah alumni. *Tahap kedua* adalah dari tiap-tiap kelompok tersebut kemudian dipilih masing-masing sepuluh subjek.

Metode kedua yakni observasi, dilakukan dengan cara melihat langsung beberapa kejadian dan tindakan politik subjek, baik yang berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pengembangan partai oleh ulama, serta beberapa bentuk respon atau partisipasi masyarakat terhadap kegiatan politik ulama tersebut.

Adapun metode kajian dokumen dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen dan sumber-sumber tertulis dari berbagai pihak. Dalam hal ini ada tiga sumber dokumen yang

diperoleh: *pertama*, catatan kesekretariatan dari lima partai politik yaitu PKB, PPP, PKU, Suni, dan PNU; *Kedua*, catatan selama proses dan setelah pemilu 1999 yang dimiliki KIPP Bantul (dimana peneliti juga bertindak sebagai pengurus di dalamnya); *Ketiga*, dokumen resmi hasil pemilu 1999 yang dimiliki oleh PPD II Bantul.

Terhadap seluruh kegiatan penelitian ini semuanya dilakukan dengan mengambil *setting* penelitian atau lokasi di dua kecamatan wilayah kabupaten Bantul, yakni kecamatan Sewon dan Pleret.

Adapun di dalam proses penggalian data di lapangan, peneliti telah melakukannya dengan terlebih dahulu mengecek ulang terhadap setiap data yang diperoleh yaitu dengan cara triangulasi. Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan variasi metode sebagaimana telah dijelaskan di atas, juga variasi situasi dan sumber data.

Akhirnya, dari keseluruhan data yang sudah terkumpul, kemudian dilakukan penelaahan secara kualitatif dengan model *flow* sebagaimana dianjurkan Miles dan Huberman (1984), yakni melalui proses yang berawal dari *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan berakhir dengan *conclusion drawing and verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Kepemimpinan Politik Ulama

Bahwa proses kepemimpinan politik ulama dapat diamati dari perilaku kepemimpinannya dalam mengelola sebuah partai politik. Seperti cara dalam pengambilan keputusan, menampung masukan, memberikan perintah atau delegasi, memberikan dorongan, dan menyediakan ruang partisipasi aktif dari para anggota pengurus partai.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para ulama yang terlibat sebagai pengurus di lima partai politik (PKB, PPP, SUNI, PKU, dan PNU) pada umumnya menampilkan diri sebagai sosok pemimpin yang relatif terbuka terhadap seluruh kegiatan dan kebijakan yang dilakukannya, akomodatif terhadap semua usul, kritik dan masukan orang lain, serta aspiratif terhadap beberapa keinginan anggota pengurus lainnya dalam wadah organisasi partai politik.

Empat dari lima ulama yang diteliti selalu melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, bahkan beberapa di antaranya, yakni ulama *sepuh*, lebih sering mendelegasikan banyak urusan dan mempercayakan dalam pengelolaan partai kepada tenaga-tenaga yang lebih muda. Fenomena tersebut relatif berlaku untuk seluruh pemimpin partai politik di lima parpol tersebut. Lebih-lebih sangat menonjol terlihat

di dalam pengelolaan PKB dan PNU, sementara hanya di PKU yang kurang melakukan musyawarah.

Menurut anggapan mereka, kekuasaan dalam tubuh partai tidak bisa ditangani secara individual yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia politik. Maka dari itu, kekuasaan perlu dibagi dan dilakukan secara kolektif melalui delegasi dan musyawarah. Menurut pengakuan mereka, semua pemimpin memiliki kelebihan dan kelemahan. Apabila kelemahan itu tetap dipaksakan dan dilakukan oleh dirinya, ia telah melakukan kegiatan kepemimpinan secara *dholim* (menjalankan sesuatu yang bukan bidang ahlinya).

Para ulama di lima partai politik tersebut semuanya mengakui belum sepenuhnya memiliki kemampuan manajerial dalam mengurus partai. Mereka merasa masih memiliki banyak kelemahan. Untuk itu, sikap keterbukaan, akomodatif, dan aspiratif menurutnya sangat penting untuk memberikan peluang pengurus lain secara kolektif membesarkan partai. Salah seorang di antara mereka mengumpamakan *sirah* (kepala) itu tidak bisa *mlaku* (berjalan), *nyekel* (memegang), *ndeleng* (melihat), *ngrungu* (mendengar), tetapi bisa *mikirke* (memikirkan) dan *nggathukke* (mengkoordinasikan). Oleh karenanya, secara umum proses kepemimpinan politik ulama dikategorikan sebagai *demokratis*. Maksudnya kepemimpinan yang membagi kekuasaannya dengan

orang lain dan dilaksanakan untuk menghormati martabat pribadi manusia.

Karakter Kepemimpinan Politik Ulama

Selain pendekatan dari sisi proses, kepemimpinan politik juga didekati dari sisi karakter. Karakter kepemimpinan ulama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: (a) tingkat keaktifan ulama dalam bekerja sebagai pemimpin partai, dan (b) tingkat kepositifan ulama politik dalam mengapresiasi hasil pekerjaannya sehingga terdapat empat karakter kepemimpinan politik ulama.

Dari penelitian yang dilakukan, telah ditemukan bahwa ada 4 (empat) dari 5 (lima) ulama yang terlibat dalam kepengurusan lima partai politik di atas, memiliki karakter kepemimpinan *aktif-negatif*. Dalam arti, dari sisi aktivitas kepemimpinannya, mereka sangat aktif bekerja dalam mengembangkan partai yang dipimpinnya, terutama dalam rangka memenangkan perolehan suara pada Pemilu 1999. Di antara mereka yang paling *getol* dalam bekerja adalah para ulama muda yang umurnya di bawah 50 tahun seperti di PKU, PNU, SUNI, dan PKB. Lebih-lebih mereka yang berkedudukan sebagai ketua dewan eksekutif (*tanfidzi*) di partainya yakni PKB dan PNU.

Ditinjau dari sisi penilaian terhadap kinerja mereka sendiri, ternyata para ulama partai kurang menghargai atau kurang menilai

tinggi hasil pekerjaannya. Mereka menilai tindakan aktif di atas adalah hal yang *lumrah* (wajar) sehingga tidak perlu dinilai tinggi menurut anggapannya. Keaktifan dalam berusaha bagi mereka adalah keharusan sebagaimana perintah agama sebagai bagian *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan atau kerusakan).

Mereka menganjurkan semua orang dalam segala tingkatannya wajib bekerja keras. Mereka mengistilahkan dengan *fardu 'ain* (keharusan setiap individu). Adapun hasilnya *Allah* (Tuhan) yang menentukan. Menurutnya, bila ada orang yang tidak mau bekerja giat, berarti dia tergolong orang *kaslan* (malas) yang dilarang oleh agama.

Dalam pandangan pengurus lain dan masyarakat, semua ulama partai politik di atas telah amat bekerja giat. Bahkan, salah satu di antaranya menyebutkan ulama yang diikutinya tersebut bekerja tanpa mengenal lelah, lebih-lebih pada musim kampanye Pemilu 1999. Hampir tidak ada waktu beristirahat, semuanya digunakan untuk berkampanye, rapat partai, dan menerima banyak tamu di rumahnya.

Memudarnya Kepemimpinan Politik

Dengan melihat hasil perolehan suara pada Pemilu 1999 oleh kelima partai politik yang diteliti, tampak jelas rendahnya

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan otoritas kepemimpinan politik ulama, terutama menyangkut menurunnya pengaruh kepemimpinan politik ulama terhadap kepatuhan anggota masyarakat, disebabkan oleh empat hal di bawah ini.

1. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di dua kecamatan kabupaten Bantul yaitu Sewon dan Pleret sedang mengalami dampak krisis ekonomi yang luar biasa. Akibat dari krisis itu sebagian besar anggota masyarakat menjadi sengsara memikirkan keadaan ekonomi keluarganya. Harga-harga terus merangkak naik, sementara penghasilan tidak menentu akibat belum stabilnya keadaan. Bagi kaum pedagang, keuntungan yang didapat tidak pasti karena perkembangan harga komoditas tidak bisa direncanakan secara pasti. Bagi kelompok pekerja informal, pendapatan yang didapat juga naik turun. Bagi pegawai negeri golongan rendah, gajinya juga masih belum bisa mengejar harga-harga barang konsumsi yang terus melangit. Keadaan semacam ini secara akumulatif menyebabkan pikiran sebagian besar anggota masyarakat pada waktu itu terkonsentrasi pada bagaimana mencari penghasilan yang lebih baik sehingga hubungan politiknya dengan ulama menjadi terlupakan.
2. Dengan adanya iklim reformasi, banyak bermunculan media komunikasi seperti siaran langsung berita-berita dari televisi

swasta yang seringkali memberitakan peristiwa-peristiwa politik di tanah air. Pada bagian lain, media surat kabar seperti koran, majalah, dan tabloid banyak bermunculan yang isinya memberitakan fenomena politik di tanah air. Hal ini menjadikan informasi-informasi politik bisa didapatkan masyarakat secara langsung lebih cepat. Oleh karenanya, keberadaan ulama yang dahulunya dijadikan sebagai sumber informasi dan sumber panutan dalam masalah-masalah politik menjadi sedikit demi sedikit memudar.

3. Tingkat pendidikan masyarakat di dua kecamatan daerah penelitian (Sewon dan Pleret) telah mengalami perubahan yang sangat drastis. Apalagi Sewon sebagai daerah kecamatan yang relatif sudah menjadi perkotaan, banyak penduduknya sudah menjadi makin terpelajar, di antaranya mereka yang bergelar sarjana sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Akibat dari peningkatan pendidikan formal masyarakat ini adalah adanya pertimbangan-pertimbangan rasional dan realistik dari tiap-tiap individu masyarakat menjadi lebih menonjol. Oleh karena itu, untuk menentukan pilihan politiknya, masyarakat tidak harus meminta pertimbangan orang lain, tetapi atas dasar pertimbangan rasional dirinya.
4. Arus modernisasi yang mengemuka di masyarakat juga turut mempengaruhi hubungan politik ulama dengan masyarakat.

Akibat adanya arus modernisasi yang sudah merebak di kalangan masyarakat. Hal-hal yang dahulunya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sakral lambat laun dianggap tidak sakral lagi. Hal ini telah menggiring masyarakat pada kesakralan lembaga ulama menjadi tidak lagi. Ulama pada akhirnya hanya ditempatkan sebagai penasihat masalah-masalah keagamaan dan keluarga semata. Berkaitan dengan masalah politik, lambat laun tidak merupakan sesuatu yang sakral antara halal dan haram, tetapi lama kelamaan menjadi hal biasa. Pilihan politik akhirnya juga hanya menjadi pilihan pribadi masing-masing.

Deskripsi hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya otoritas kepemimpinan politik ulama tersebut tercermin dalam menurunnya kepatuhan massa pengikut terhadap fatwa politik ulama. Secara substansial hal ini menyangkut faktor: (a) beban ekonomi, (b) peran media massa, (c) perkembangan tingkat pendidikan masyarakat, dan (d) pola pikir rasional-realistik dari dampak modernisasi. Keempat faktor penentu ini sebenarnya ada satu yang sifatnya tentatif, yakni faktor yang berupa beban ekonomi. Akan tetapi, ketiga faktor lainnya merupakan faktor yang menjadi gejala yang sama di beberapa tempat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, mayoritas ulama telah melaksanakan kepemimpinannya sebagai ketua atau pengurus partai politik secara demokratis; dalam arti mereka selalu menampilkan diri sebagai sosok pemimpin yang relatif terbuka, akomodatif, aspiratif terhadap keinginan-keinginan anggota pengurus lainnya dalam organisasi partai politik. hal itu tampak seperti seringkali dilakukan musyawarah dan seringkali menyerahkan beberapa urusan kepada tenaga-tenaga yang lebih muda.

Kedua, para ulama pada umumnya memiliki karakter kepemimpinan yang berjenis aktif-negatif. Maksudnya mereka sangat sungguh-sungguh dalam bekerja, seolah tanpa kenal lelah sehingga dikenal sebagai sosok yang sangat aktif bekerja, terutama dalam mengembangkan partai yang dipimpinnya dalam rangka memenangkan perolehan suara pada Pemilu 1999. Meskipun mereka sangat aktif mengelola partai, penilaian terhadap kinerja mereka sendiri masih kurang menghargai atau kurang menilai tinggi.

Ketiga, faktor penyebab terjadinya penurunan kepatuhan massa pengikut terhadap kepemimpinan politik ulama adalah berupa: (a) beban ekonomi yang begitu menjerat masyarakat

sebagai akibat krisis yang berkepanjangan; (b) banyaknya media massa yang memberikan informasi secara luas yang menyebabkan terbukanya wawasan masyarakat; (c) tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat yang makin meningkat; dan (d) tumbuhnya pertimbangan yang rasional-realistis dari masyarakat sebagai imbas dari akumulasi hal-hal di atas.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya rekomendasi yang bisa diberikan berkaitan dengan simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh partai politik dapat menata diri menjadi partai politik yang modern dengan sistem pengelolaan yang profesional seiring dengan tuntutan zaman dan masyarakat secara luas. Upaya mewujudkan partai politik yang modern serta sistem pengelolaannya yang profesional tersebut dengan sendirinya membutuhkan antara lain personalia pengurus partai politik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas cukup memadai. Dalam arti, partai harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan kecakapan di bidangnya. Meskipun mereka itu *public figure* dan tokoh panutan seperti ulama atau kiai, seandainya mereka tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dipersyaratkan hendaknya tidak perlu dipakai.
2. Upaya menempatkan ulama yang kurang memiliki keahlian dan kecakapan sebagai pengurus apalagi sebagai ketua partai politik

- adalah salah satu usaha yang kurang mendukung terwujudnya sistem kepartaian modern dan profesional.
3. Dewasa ini masyarakat sudah makin sadar akan kebutuhan dan masa depannya. Oleh karenanya, kebutuhan dan harapan masa depannya harus mampu dibaca serta dijawab oleh partai politik dan para politisi di dalamnya, terutama partai-partai politik yang mengandalkan dukungan dari massa pendukung setianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. (1993). *Peran Ulama di Masa Depan*. Bangkok No.6 September-Oktober 1993. Yogyakarta: LKPSM
- J. Kristiadi. (1996). *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih*. Prisma No.3-1996. Jakarta: LP3ES.
- Jackson, Karl D. (1980). *Traditional Authority, Islam and Rebellion. A Studi of Indonesian Political Behavior*. Berkeley: University of California Press.
- Lexy J. Moleong. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Beherly Hills: Sage Publications.
- Muhammad Asfar. (1997). *Pergeseran otoritas Kepemimpinan Politik Kiai*. Jurnal Ilmu Politik, No.17 Jakarta: AIPI-LIPI-Gramedia.
- MM. Billah. (1978). *Agama dan Politik: Pergeseran Pola Kepemimpinan*. Prisma No.5. Jakarta: LP3ES.

3. Billah Taqwa. (1996). *Perilaku Pemilih Umat Islam Indonesia*. Prisma No.3-1996. Jakarta: LP3ES.
- Ernan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Muhammad Dhoifur. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES